

BAB I

PENDAHULUAN

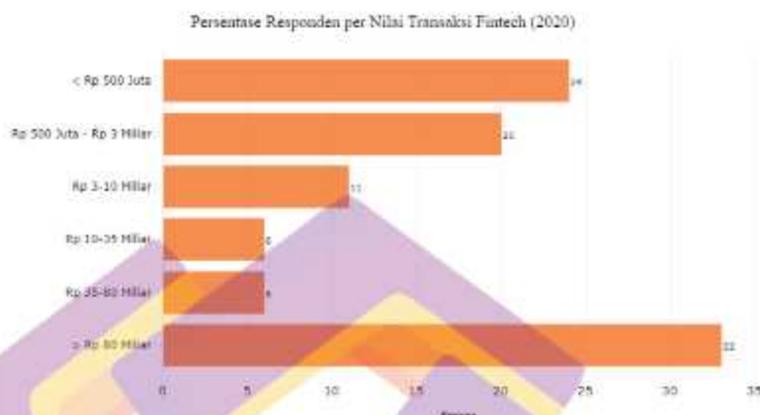
1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi tumbuh dengan begitu sangat pesat pada kurun waktu terakhir ini, hal tersebut tidak hanya di negara Indonesia saja, negara lain di dunia ikut pula merasakan pertumbuhan teknologi yang senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Masa digital sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa pemakaian teknologi merupakan keharusan bagi setiap orang.

Karena itu, teknologi telah memasuki sejumlah industri, termasuk industri keuangan, di mana *Financial Technology* (Fintech) yang digunakan dalam penyediaan layanan keuangan semakin berkembang. *Financial Technology* kini memiliki sejumlah terobosan dalam layanan keuangan, termasuk instrumen pembayaran, instrumen pinjaman, dan lainnya yang mulai terbentuk di era digital saat ini. Menurut Bank Indonesia, Fintech adalah sistem teknologi finansial yang dapat menciptakan suatu produk, layanan, teknologi, dan perusahaan, dan dapat berdampak pada stabilitas keuangan dan moneter (Mustikasari dan Nurviardi, 2020).

Karena teknologi keuangan, khususnya pembayaran elektronik, dapat beroperasi sebagai alat atau teknologi untuk memfasilitasi proses transaksi antara pembeli dan penjual, serta dapat menghilangkan celah atau penipuan dalam proses transaksi, banyak orang telah beralih ke teknologi tersebut saat ini. *E-payment* adalah nama lain dari metode pembayaran yang sah yang tidak membutuhkan penggunaan uang kertas. Pertumbuhan *e-payment* di Indonesia melampaui industri ritel dan pasar produk untuk memasukkan layanan keuangan seperti Modalku, Uang Friend, dan layanan transportasi seperti Grab (Sabila, 2021).

Tabel 1.1
Nilai Transaksi Fintech



Sumber : databoks.katadata. 2020

Hasil survei nilai transaksi yang dilakukan oleh pelaku bisnis *financial technology* (fintech) di Indonesia dipublikasikan oleh *Asosiasi Fintech Indonesia* (AFTECH). Sementara 24% responden hanya melakukan transaksi dengan total kurang dari Rp500 juta, 33% responden melakukan transaksi senilai lebih dari Rp80 miliar. Kemudian, 11% melakukan transaksi senilai Rp3-10 miliar, sementara hingga 20% melaporkan nilai transaksi antara Rp500 juta dan Rp3 miliar. Hanya 6% responden yang mengatakan menghabiskan antara Rp 35 hingga 80 miliar. (Marpaung, 2021)

E-payment atau pembayaran elektronik adalah salah satu jenis *Fintech* yang semakin populer digunakan oleh berbagai sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak UMKM di Indonesia, termasuk di Kabupaten Klaten, yang belum menggunakan *E-payment* sebagai metode pembayaran.

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi minat UMKM untuk menggunakan *e-payment* meliputi kepercayaan, pengetahuan, risiko, keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas faktor-faktor

tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap minat pengusaha UMKM di Kabupaten Klaten untuk menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran.

Industri *e-payment* di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dan *smartphone* yang semakin meningkat, mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi digital. Berbagai perusahaan teknologi dan finansial di Indonesia seperti Gojek, OVO, dan LinkAja, serta platform *e-commerce* seperti Tokopedia dan Bukalapak, juga berlomba-lomba untuk memperluas layanan *e-payment* mereka.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi *e-payment* di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp 4.522 triliun, meningkat sebesar 43,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah transaksi *e-payment* mencapai 12,2 miliar transaksi, meningkat 31,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong pertumbuhan industri *e-payment* melalui berbagai inisiatif dan kebijakan seperti Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan Peta Jalan Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi *e-payment* di Indonesia dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan pembayaran digital.

Untuk mengatasi minimnya pengetahuan tentang industri keuangan dan agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh produk dan investasi yang menawarkan return tinggi dalam jangka pendek tanpa memperhitungkan risikonya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pentingnya Misi dari program literasi keuangan adalah agar masyarakat Indonesia dapat mengelola keuangannya secara cerdas. Dewi Maysari Haryanti, *co-founder UKMIndonesia.id*, dalam acara *Fintech Talk* pada Jumat, 11 Desember 2021 mengatakan bahwa UKM memiliki masalah produktivitas, namun ketersediaan fintech kini membuat masalah tersebut menjadi lebih sederhana.. Ternyata UMKM masih memerlukan informasi yang harus ditingkatkan, seperti *supply chain*, management administrasi, dan *sales invoice*. Lima lembaga pemerintah Bank Indonesia, Polri, Bareskrim Cyber, Kemkominfo, dan Kemenkop UKM telah menjalin kerja sama dengan OJK. Bersamaan dengan pengembangan aplikasi, langkah pencegahan dilakukan melalui

peningkatan literasi keuangan, edukasi, dan kolaborasi. Tujuan jangka panjang dari literasi keuangan termasuk meningkatkan jumlah individu yang memanfaatkan barang dan jasa keuangan dan meningkatkan literasi mereka yang sebelumnya kurang melek huruf atau buta huruf. Literasi keuangan diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi karena transaksi besar dapat membantu roda perekonomian berjalan lancar. (Sugiarti et al., 2019).

Di tahun 2016, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kembali dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Provinsi di Jawa dan Bali masih memiliki skor literasi keuangan tertinggi. Di DKI Jakarta, skor indeks mencapai 40%, yang merupakan yang tertinggi. Jawa Barat dan DI Yogyakarta masing-masing berada di urutan kedua dan ketiga dengan 38,70% dan 38,55%. Tingkat literasi keuangan di Indonesia secara keseluruhan sebesar 29,66 persen pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan studi pembandingan yang dilakukan pada tahun 2013 yang mencapai 21,84 persen, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, indeks literasi keuangan SBLIK melibatkan 9.860 responden dari 64 kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, stratifikasi geografis, usia, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Tabel.1.2
Mayoritas UMKM Gunakan Layanan Tunal untuk Transaksi Keuangan



Sumber : databoks.katadata

Mayoritas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menggunakan layanan tunai untuk transaksi keuangan, menurut riset dari *startup financial technology Amartha and Katadata Insight Center (KIC)*. Menurut temuan studi *Indonesia Grassroots Entrepreneurs Report 2022*, 85,6% UMKM masih melakukan operasi keuangannya secara tunai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak UMKM yang masih awam dengan layanan perbankan digital. Sebanyak 0,2% UMKM yang sudah menggunakan transaksi nontunai dan 14,2% UMKM yang menggunakan transaksi tunai atau nontunai. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa UMKM masih lebih memilih layanan lain daripada layanan nontunai. Pertama, UMKM khawatir jika menggunakan layanan nontunai akan membuat mereka terlihat bodoh. Kedua, mereka tidak mengetahui fitur dan cara memanfaatkannya. Ketiga, mereka kurang percaya diri dalam memiliki barang-barang nontunai dan digital. Dalam studi ini, 402 responden dengan perusahaan mikro dan ultramikro berpartisipasi dalam survei. Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan menjadi tempat tinggal para pelaku UMKM tersebut. Survei dilakukan antara 1 dan 8 November 2021. Dengan interval kepercayaan 95%, *margin error* sekitar 4,9%.

Beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Klaten sudah mulai menggunakan layanan *e-payment* salah satunya OVO melalui aplikasi Grab. Di Kabupaten Klaten, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mayoritas bergerak di industri makanan serta minuman. Beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini melakukan pemesanan melalui aplikasi seperti Grab. Oleh karena itu, barang dan minuman tersebut dapat dipesan menggunakan aplikasi Grab, dan pembayaran dapat dilakukan menggunakan OVO. Namun, masih terdapat kendala dalam pengembangan penggunaan *e-payment* pada UMKM di Kabupaten Klaten. Salah satu kendala tersebut adalah minimnya minat UMKM untuk menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran.

Tabel 1.3

Daftar UMKM di Kabupaten Klaten

No	Jenis / Skala Usaha	Mikro	Kecil	Menengah
1	Makanan/Minuman	320	397	1
2	Jasa	31	17	-
3	Perdagangan	132	86	-
4	Peternakan	89	4	-
5	Perhotelan	34	1	-
6	Lain-lain	301	64	-
Jumlah		907	569	1

Sumber: Data Perindag, diolah 2022

Dari Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa UMKM yang berada di Kabupaten Klaten hampir semua berskala mikro. Adapun jenis usaha para pelaku UMKM peneliti klasifikasikan menjadi empat, yaitu makanan/minuman, jasa, kelontong dan lain-lain. Lain-lain jumlahnya terbesar karena sebagian besar jumlah UMKM belum teridentifikasi jenis usahanya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) dan Pringgadini (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *e-payment*. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2020) kepercayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat nasabah menggunakan *mobile banking*. Pada penelitian yang dilakukan Sholehah (2022) menunjukkan variabel pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Maier (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan *e-payment*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Namira (2020) memperoleh kesimpulan bahwa resiko berpengaruh positif terhadap minat UMKM dalam menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Saputri (2022) dan Pringgadini (2022) bahwa resiko tidak memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan *e-*

payment sebagai metode pembayaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanto dan Baskoro (2020), keamanan memiliki pengaruh negatif terhadap minat penggunaan *financial technology*, termasuk *e-payment*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pringgadini (2022) dan Putri (2019) yang menunjukkan keamanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *e-payment*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam upaya mendorong pembangunan, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja ekonomi di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas di banyak industri. Dengan tumbuh dan berkembangnya UMKM, diharapkan dapat meningkatkan Produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih banyak tenaga kerja baru, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Persaingan semakin ketat akibat banyaknya UMKM yang bermunculan. Terlebih saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memaksa para pelaku UMKM untuk mengembangkan ide-ide segar guna memenuhi permintaan konsumen dan mengangkat Indonesia ke puncak pasar baik di negaranya sendiri maupun di ASEAN (Sugiarti et al.,).

Berdasarkan hasil penemuan penelitian terdahulu dan penjelasan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pelayanan *e-payment* yang saat ini sedang marak digunakan oleh masyarakat milenial khususnya pelaku UMKM, maka peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Ukm Di Kabupaten Klaten Menggunakan *E-payment* Sebagai Metode Pembayaran”.

1.2 Batasan Masalah

Berikut batasan masalah dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM di Kabupaten Klaten dalam menggunakan *e-payment* sebagai alat pembayaran:

1. Penelitian ini hanya akan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengusaha UMKM di Kabupaten Klaten untuk menggunakan *E-payment* sebagai metode pembayaran.

2. Penelitian ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif pengusaha UMKM dan bukan konsumen.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepercayaan, pengetahuan, risiko, dan keamanan sistem *E-payment*.
4. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang beroperasi di Kabupaten Klaten.
5. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka perumusan masalah dari penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM di Kabupaten Klaten Menggunakan *E-payment* sebagai Metode Pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat UMKM di Kabupaten Klaten menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran?
2. Apakah variabel pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap minat UMKM di Kabupaten Klaten menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran?
3. Apakah variabel risiko memiliki pengaruh positif terhadap minat UMKM di Kabupaten Klaten menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran?
4. Apakah variabel keamanan memiliki pengaruh positif terhadap UMKM di Kabupaten Klaten menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM di Kabupaten Klaten Menggunakan *E-payment* sebagai Metode Pembayaran adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel kepercayaan terhadap minat UMKM di Kabupaten Klaten menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel pengetahuan terhadap minat UMKM di Kabupaten Klaten menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel risiko terhadap minat UMKM di Kabupaten Klaten menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel keamanan terhadap minat UMKM di Kabupaten Klaten menggunakan *e-payment* sebagai metode pembayaran

Manfaat:

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengusaha UMKM di Kabupaten Klaten untuk menggunakan *E-payment* sebagai metode pembayaran, sehingga dapat membantu pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung penggunaan *E-payment* di wilayah tersebut.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang mendorong penggunaan *E-payment* di kalangan UMKM di Kabupaten Klaten.
3. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha dalam memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi bisnis.
4. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait penggunaan *E-payment* di kalangan UMKM di wilayah lain.